



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI V DPR RI

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2012 – 2013
 Masa Sidang : I
 Rapat : Ke –
 Jenis Rapat : Rapat Kerja
 Hari/Tanggal : Senin, 17 September 2012
 Sifat : Terbuka
 Pukul : 11.20 WIB s.d 15.40 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
 Acara : Pembahasan Dana Alokasi Khusus Mitra Kerja Komisi V DPR RI
 Ketua Rapat : Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow
 Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, MSi
 Hadir Anggota : dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI
 Hadir Mitra : Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan diwakili Wakil
 Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan Rakyat, dan Menteri
 Pembangunan Daerah Tertinggal beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 11.20 Wib setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan Rakyat, dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal pada hari ini adalah Pembahasan Dana Alokasi Khusus Mitra Kerja Komisi V DPR RI.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Wakil Menteri Perhubungan. untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk berperan dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan termasuk sistem pelaporan terhadap kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK).
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk melakukan penajaman dan penyempurnaan kriteria teknis secara terus-menerus termasuk menyempurnakan *database* agar program kegiatan dan daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih tepat sasaran.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal agar dalam menentukan kriteria daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mencerminkan keadilan dan pemerataan yang akan dipertajam pada Rapat Dengar Pendapat.
4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk menyampaikan daftar SKPD (Provinsi dan Kab/Kota) yang belum memberikan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 yang akan dijadikan bahan evaluasi dan masukan dalam perencanaan alokasi DAK TA 2013.
5. Dalam rangka meningkatkan manajemen Dana Alokasi Khusus (DAK), Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal agar :
 - a. Pengalokasian daerah penerima DAK didasarkan atas program nyata untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
 - b. Memprioritaskan daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah;
 - c. Mengusulkan perubahan pola DAK yang pencairan dananya disesuaikan dengan progress pelaksanaan kegiatan;
 - d. Pengadaan Dana pendamping tidak menjadi syarat mutlak dalam pengalokasian DAK;
 - e. Memperbaiki sistem pelaporan/monev yang baik untuk pengawasan dan pengendalian;
 - f. Menjadikan Sistem pelaporan DAK sebagai dasar penentuan kebijakan selanjutnya dengan memberlakukan mekanisme *reward and punishment*; dan
 - g. Melakukan sinkronisasi program DAK antar kementerian Mitra Kerja Komisi V DPR RI sehingga DAK bisa menjadi bagian solusi untuk memenuhi sebagian kekurangan dana dan sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB.

Jakarta, 17 September 2012

KETUA RAPAT,

ttd

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

WAKIL MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

DJAN FARIDZ

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

ttd

A. HELMY FAISHAL ZAINI

